



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai V, Kode Pos 77212  
E-mail: [diskominfo@kaltaraprov.go.id](mailto:diskominfo@kaltaraprov.go.id) Website: [diskominfo.kaltaraprov.go.id](http://diskominfo.kaltaraprov.go.id)  
TANJUNG SELOR

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 16/PPTK/DKISP.SET/2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 03/PPTK/DKISP.SET/2022 TENTANG PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan dan Sub Kegiatan ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertugas dan bertanggung jawab membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

12. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor xx Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara : (...../2020);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor ..).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1425);
  3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor ...);
  6. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.44/K.856/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara selaku Pengguna Anggaran Nomor : 03/PPTK/DKISP.SET/2022 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas :
- (1). Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - (2). Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan;
  - (3). Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada Tanggal 13 Juni 2022

Kepala Dinas,



ILHAM ZAIN, S.Sos, M.PA  
Pembina Tingkat I / IV b  
NIP. 19670407 199803 1 007

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Utara.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Pejabat yang ditunjuk.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU PENGGUNAN ANGGARAN

NOMOR : 16/PPTK/DKISP.SET/2022

TANGGAL 13 JUNI 2022

TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR: 03/PPTK/DKISP.SET/2022 TENTANG PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian			Pagu Anggaran	Nama, NIP, Pangkat/Golongan
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah (Rp.)	
1	2	3	4	5	6
<b>2.16.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				
<b>2.16.01.1.01</b>		<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			
2.16.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	
<b>2.16.01.1.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
2.16.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.297.814.768,00	
2.16.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	500.000.000,00	
2.16.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	164.160.000,00	
2.16.01.1.02.08			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	191.620.000,00	
<b>2.16.01.1.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			
2.16.01.1.03.05			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	63.600.000,00	
<b>2.16.01.1.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			
2.16.01.1.05.04			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	15.000.000,00	
2.16.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.000.000,00	
<b>2.16.01.1.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
2.16.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.500.000,00	
2.16.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	192.966.387,00	
2.16.01.1.06.09			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	339.546.383,00	

H. ISKANDAR S.IP, M.Si  
NIP. 19731231 199302 1 001  
Pembina Tingkat I / IV b

Kode	Uraian			Pagu Anggaran	Nama, NIP, Pangkat/Golongan	
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	
<b>2.16.01.1.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>H. ISKANDAR S.IP, M.Si</b> <b>NIP. 19731231 199302 1 001</b> <b>Pembina Tingkat I / IV b</b>	
2.16.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000,00		
2.16.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	498.000.000,00		
2.16.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.357.104.000,00		
<b>2.16.01.1.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
2.16.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	94.010.000,00		
2.16.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	97.280.000,00		
			<b>JUMLAH</b>	<b>9.943.601.538,00</b>		
<b>2.16.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b>					
<b>2.16.02.1.01</b>		<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</b>				
2.16.02.1.01.10			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	204.660.900,00	<b>SUGIANTO ALBERT, S.Kom., MM.</b> <b>NIP. 19760808 200312 1 006</b> <b>Pembina IV/a</b>	
2.16.02.1.01.11			Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	603.000.000,00		
			<b>JUMLAH</b>	<b>807.660.900,00</b>		
2.16.02.1.01.12			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	8.240.000.000,00	<b>NUZUL ALFI KURNIA, S.IP</b> <b>NIP. 198808092015031001</b> <b>Penata Muda Tk. 1/ III b</b>	
2.16.02.1.01.13			Penyediaan / Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	3.274.860.000,00		
			<b>JUMLAH</b>	<b>11.514.860.000,00</b>		

Kode	Uraian			Pagu Anggaran	Nama, NIP, Pangkat/Golongan
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah (Rp.)	
1	2	3	4	5	6
<b>2.16.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>				
<b>2.16.03.1.01</b>		<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>			
2.16.03.1.01.01			Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	19.990.000,00	<b>DEDDY HARRYADY S.Kom</b> <b>NIP. 198401272010011005</b> <b>Penata Tk. 1/ III d</b>
2.16.03.1.01.02			Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	90.000.000,00	
2.16.03.1.01.03			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.638.000.000,00	
<b>2.16.03.1.02</b>		<b>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah</b>			
2.16.03.1.02.03			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	80.000.000,00	
2.16.03.1.02.04			Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	52.742.300,00	
2.16.03.1.02.08			Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	136.000.000,00	
2.16.03.1.02.09			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	1.410.580.000,00	
			<b>JUMLAH</b>	<b>3.427.312.300,00</b>	

Kode	Uraian			Pagu Anggaran	Nama, NIP, Pangkat/Golongan
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah (Rp.)	
1	2	3	4	5	6
<b>2.20.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>				
<b>2.20.02.1.01</b>		<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</b>			<b>JUFRI, S.Hut.</b> <b>NIP. 197405141997071001</b> <b>Penata Tk.I / IId</b>
2.20.02.1.01.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	43.750.000,00	
2.20.02.1.01.03			Membangun Metadata Statistik Sektoral	21.532.616,00	
2.20.02.1.01.05			Pengembangan Infrastruktur	35.000.000,00	
			<b>JUMLAH</b>	<b>100.282.616,00</b>	
<b>2.21.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN</b>				
<b>2.21.02.1.01</b>		<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah Provinsi</b>			<b>KALDRIM, A.Md.</b> <b>NIP. 19730321 200312 1 007</b> <b>Penata/ III c</b>
2.21.02.1.01.02			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	53.200.000,00	
2.21.02.1.01.03			Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	9.054.545,00	
2.21.02.1.01.04			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	38.222.727,00	
			<b>JUMLAH</b>	<b>100.477.272,00</b>	
<b>TOTAL PAGU</b>				<b>25.894.194.626,00</b>	

Kepala Dinas,



ILHAM ZAIN, S.Sos, M.PA  
Pembina Tingkat I / IV b  
NIP. 19670407 199803 1 007